



KAPABILITAS PASUKAN PERDAMAIAN INDONESIA DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Sriyanto

Mahasiswa SKM Unhan/Sesko TNI

Email: (yanki032001@gmail.com)

Abstract

The purpose of this research is to analyze the capabilities of the Indonesian peacekeepers and the TNI's strategies in carrying out the development of the capabilities of the Indonesian peacekeepers to face multidimensional threats in the United Nations Peacekeeping Mission in the Democratic Republic of the Congo. This research uses a qualitative method with a case study research design on several events in the implementation of the UN peacekeeping capability development carried out by the TNI in the period of 2018 to 2020. The case studies describes the positive things of the capability development process shown by some achievements gained by Indonesian Peacekeeping Forces as well as some incidents that need to draw attention by TNI in one of the Indonesian peacekeeping missions in the Democratic Republic of Congo. Data collection was carried out openly through interviews with research subjects which were directly involved in the capabilities building of the Indonesian peacekeeping forces that are supported by the researcher's experiences, field observations and data analysis referring to literature studies. The research shows that the capabilities of the Indonesian peacekeepers have not been fully prepared to face multidimensional threats. Among some successes in the mission area, several incidents occurred and caused both personnel and material losses. The TNI needs to adopt the United Nations Peacekeeping Capability Readiness System (UNPCRS) as the current UN system to provide UN units that allows the development of UN peacekeeping capabilities to be carried out systematically, comprehensively and involves all aspects of capability, including human resource and unit capability standards, leadership, networking, materials, facilities and infrastructure. In addition, regulatory and budgetary aspects are critical in overall capability development efforts.

Keywords: *Peacekeeping Force, Capabilities, UNPCRS*

1. Pendahuluan

Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia/OPPD merupakan “*flagship enterprise*” PBB yang dibentuk sebagai tool PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Secara umum, terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi pelaksanaan OPPD telah dinilai berhasil dalam melaksanakan perannya untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Hal ini ditandai dengan penganugerahan Nobel Perdamaian pada



tahun 1988. (Dirjen Multilateral Kemenlu RI, 2020:7-8). Saat ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Department of Peace Operations menyelenggarakan 12 misi perdamaian yang tersebar di seluruh dunia. Dari 12 misi tersebut, 6 misi berada di benua Afrika, yaitu meliputi MINURSO di Sahara Barat (Western Sahara), MINUSCA di Republik Afrika Tengah (*Central African Republik*), MINUSMA di Mali, MONUSCO di Republik Demokratik Kongo, UNISFA di Abyei dan UNMISS di Sudan Selatan. Indonesia merupakan salah satu *Troops/Police Contributing Countries* (T/PCCs) yang berpartisipasi pada keenam misi tersebut. Dari keenam misi tersebut, kontribusi Indonesia dalam bentuk pasukan atau satuan tugas yang saat ini dilaksanakan Indonesia adalah hanya di Republik Demokratik Kongo (MONUSCO) meliputi 1 (satu) satuan Batalyon Gerak Cepat (*Rapidly Deployable Battaion/RDB*) dan 1 (satu) satuan Kompi Zeni serta di Afrika Tengah (MINUSCA) yang berupa 1 (satu) satuan Kompi Zeni, setelah berakhirnya misi PBB UNAMID di Sudan pada tahun 2020. Sedangkan bentuk kontribusi lainnya berupa personel *Military Staf* (Milstaff) dan *Military Observers* (Milobs) di keenam misi di negara Afrika.

Pada Awal penyelenggaraan OPPD, peran yang dilaksanakan masih “tradisional” yaitu terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilitas situasi di lapangan dalam rangka memberikan ruang bagi usaha-usaha politik yang diperlukan dalam menyelesaikan konflik. Dengan berakhirnya perang dingin kontek penggelaran OPPD berubah menjadi misi yang lebih “multidimensional”, yaitu menggabungkan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti aspek politik, ekonomi dan sosial sebagai bagian dari mandat yang diberikan kepada misi PBB dan melibatkan berbagai aktor selain militer, seperti polisi dan komponen sipil lainnya. Kondisi tersebut telah menuntut PBB melaksanakan reformasi, termasuk didalamnya perubahan konsep yang lebih luas, seperti dari *peacekeeping operation* menjadi *peace operation*, dan merubah Department of Peacekeeping Operation menjadi *Department of Peace Operations*.

Implementasi dari reformasi PBB pada misi perdamaian PBB terlihat pada beberapa kesamaan isi mandatnya yang dituangkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB, yaitu Perlindungan warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan dari korban kekerasan



dan pelecehan seksual (*Protection of Civilian/POC, child protection, gender sexual violence*), membantu pelaksanaan Security Sector Reform (SSR) di negara yang sedang dilanda konflik tersebut, mendukung program *Disarmament, demobilisation, reintegration/DDR* bagi milisi atau faksi militer yang beronflik, perlindungan aset PBB serta mendukung akses bantuan kemanusiaan (*humanitarian access*). Selain tuntutan tugas tersebut, para peacekeepers juga dihadapkan dengan realita ancaman multidimensional, yaitu semakin meningkatnya konflik yang bersifat asimetris, ancaman kelompok bersenjata, keterkaitan dengan jaringan teroris internasional, cyber dan juga dampak penggunaan sosial media yang dengan cepat dapat menyebarkan berita-berita provokatif atau hoaks, konflik komunal, terorisme dan radikalisme, serta penyakit menular, seperti Ebola dan Covid-19. Namun, kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia belum dipersiapkan untuk menghadapi ancaman multidimensional tersebut secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih cukup tingginya personel yang direpatriasi kembali ke Indonesia yang diakibatkan karena sakit, meninggal dunia ataupun kecelakaan dalam melaksanakan tugas. Dari dua belas personel yang direpatriasi selama periode 2018 s.d. 2020, sebagian besar dari misi yang dilaksanakan di Afrika.

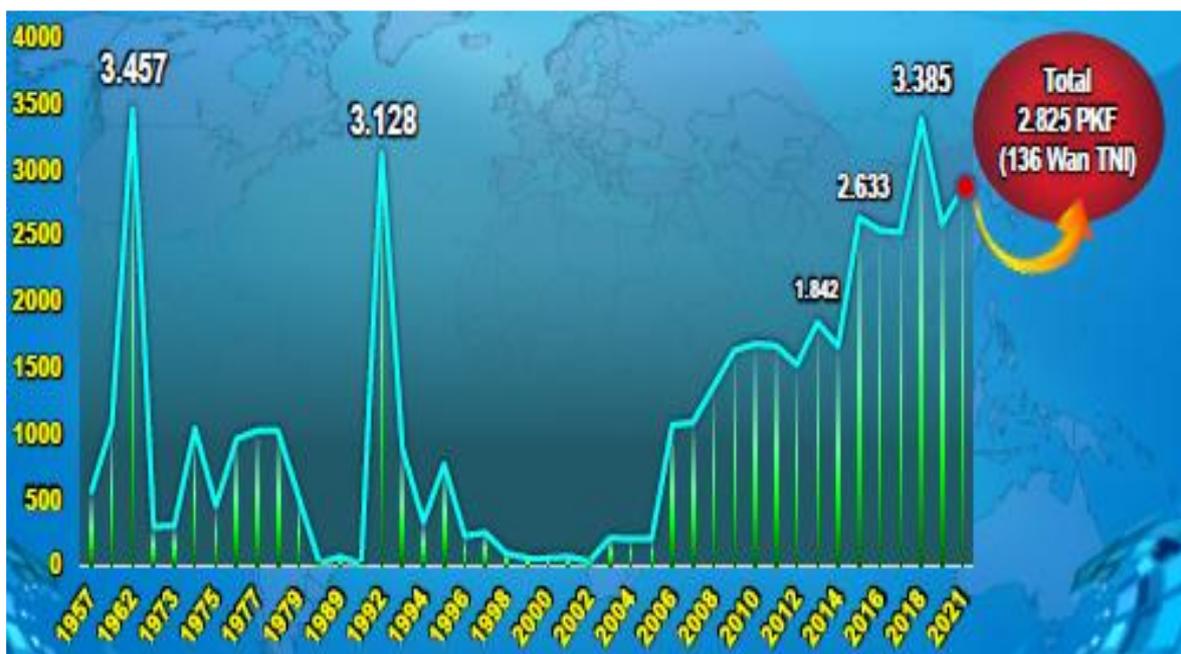
PBB menyelenggarakan mekanisme evaluasi misi yang digelar melalui *Military Capability Studies, Contingent Owned Equipments/COE inspection, Operational Readiness inspection*, dan laporan dari misi lainnya. Beberapa poin penting dari hasil evaluasi diantaranya adalah urgensi perubahan pola operasi, perubahan tuntutan tugas dan kemampuan yang harus dimiliki serta perubahan jenis Alut/Alutsista dan peralatan pendukungnya. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dari beberapa dokumen di PMPP TNI ditemukan bahwa sejak periode 2018, Satgas dari Indonesia mengalami beberapa hal menonjol yang menggambarkan kurang optimalnya pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian PBB, yang dapat dilihat dari kondisi materiil Satgas, kemampuan personel dan kesiapan operasi di lapangan.

Kurang optimalnya pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia juga terlihat dari penurunan jumlah kontribusi yang cukup signifikan dan belum adanya Satgas baru yang didaftarkan (*pledge*) dalam sistim PBB UNPCRS (*United Nations*

Peacekeeping Capability Readiness System). Di sisi lain peluang PBB yang dijabarkan dalam UNPCRS sebagai alternatif solusi atas permasalahan dukungan anggaran dan keterbatasan Alut/Alutsista yang dimiliki melalui *Light Coordination Mechanism* guna pelaksanaan mandat yang dijelaskan sebelumnya sebagai *das sollen* juga belum terealisasi. Penjajakan *operational partnerships* dengan Australia, Ethiopia dan Jepang, yang diharapkan dapat memperbesar kemungkinan pengiriman tambahan pasukan perdamaian dari Indonesia bersama pasukan perdamaian dari ketiga negara tersebut sekaligus mempromosikan Alutsista produksi dalam negeri, seperti Anoa, Komodo dan persenjataan lainnya, tidak dapat dilanjutkan, disebabkan beberapa pertimbangan, baik mekanisme pengadaan Alutsista dan material yang terlampau panjang, khususnya dengan Ethiopia, serta pertimbangan keamanan dan kebijakan politik luar negeri negaranya, khususnya dengan Australia dan Jepang. Selain itu salah satu pertimbangan dilaksanakannya pengurangan jumlah pasukan perdamaian dalam suatu misi PBB juga dari parameter kapabilitas pasukan itu sendiri yang dilihat dari hasil *COE inspection*, *Operational Readiness inspection* serta pemenuhan jumlah *target women peacekeepers* sesuai agenda *Uniformed Gender Paity Strategy 2018-2028*.

Grafik 1.1

Jumlah Peacekeepers Indonesia Periode 1957 s.d. 2021 (Sumber : PMPP TNI)





Penelitian ini akan menganalisa strategi TNI yang dilaksanakan pada saat ini dalam membangun kapabilitas pasukan perdamaian PBB, khususnya terkait dengan tujuan kontribusi pasukan perdamaian PBB sesuai dengan amanat konstitusi (*ends*), kemampuan pemimpin atau organisasi dalam merumuskan strategi yang tepat akan menentukan keberhasilan suatu usaha dengan menggunakan metode (*ways*) yang tepat dari sumber daya (*means*) yang dimiliki. Peneliti akan mencermati beberapa hal positif yang telah dan sedang dilaksanakan serta berupaya menemukan strategi yang perlu dioptimalkan sesuai dengan beberapa kondisi di atas, khususnya dalam rangka menghadapi ancaman multidimensional di Republik Demokratik Kongo

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Strategi. Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu organisasi untuk mencapai sasaran atau tujuannya, serta dapat menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi secara efektif dan efisien. Kamus besar bahasa Indonesia menerjemahkan strategi pada beberapa arti, antara lain: (a) Ilmu dan seni mengembangkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; (b) Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam kondisi perang atau dalam kondisi yang menguntungkan; dan (c) Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi juga diartikan sebagai sekumpulan aktivitas atau tindakan yang berbeda agar bisa memberikan nilai yang unik, Adapun strategi harus merupakan aktivitas yang menggunakan banyak pendekatan serta penuh daya saing untuk mencapai kinerja yang memuaskan (Porter, 1996). Sementara itu Tjiptono (2001, hal 153) menyatakan strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, serta eksekusi dalam kurun waktu tertentu. Dia juga menekankan bahwa strategi yang baik memiliki kordinasi tim kerja, mampu mengidentifikasi faktor pendukung pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang



ditentukan, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Sebuah strategi memiliki tahapan tertentu yaitu perencanaan, implementasi dan evaluasi. Perencanaan strategi setidaknya harus mempertimbangkan visi, misi dan tujuan dari organisasi. Implementasi strategi (Rachmat, 2014) merupakan suatu proses manajemen untuk mewujudkan strategi dan kebijakan yang diambil melalui suatu tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur serta Evaluasi dan kontrol.

2.2 Teori Perdamaian. Terdapat beberapa teori perdamaian yang berkembang selama ini, salah satu teori perdamaian yang sering dijadikan sebagai landasan dalam sebuah kajian adalah yang diperkenalkan oleh Johan Galtung dalam bukunya *Peace By Peaceful Means* (1996). Bahwa terdapat dua jenis perdamaian, yaitu perdamaian negatif, dimana perdamaian terwujud karena tidak adanya konflik, Dan kedua adalah perdamaian positif yaitu suatu perdamaian yang tercipta karena adanya suatu perangkat penyelesaian konflik yang dapat berfungsi untuk mencegah konflik. Sementara menurut John Paul Lederach (1997) dalam bukunya, *"building peace"*, bahwa pembangunan perdamaian merupakan suatu konsep yang komprehensif yang mencakup, menghasilkan, dan memelihara suatu proses, pendekatan, dan tahapan yang diperlukan untuk mengubah konflik ke arah perdamaian secara berkelanjutan. Transformasi konflik ke damai harus dilakukan dengan pendekatan secara holistik dan menyeluruh dalam upaya mengelola setiap potensi kekerasan baru. Dalam konteks ini harus melibatkan semua level, baik *top level*, *middle-range level* dan *grassroots level* yang digambarkan dalam bentuk piramida peacebuilding. Sementara Michelle Maise (2003) menambahkan bahwa upaya mewujudkan perdamaian dilakukan dengan membangun hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam dinamika konflik pada setiap level pada piramida tersebut, baik secara psikologis, spritual, dan hubungan sosial, ekonomi, politik dan budaya.



Dari ketiga teori perdamaian di atas, peneliti mensintesis bahwa pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian PBB harus dapat mencakup pembinaan kemampuan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak di daerah misi, baik top level, middle-range level dan grassroots level serta mempertimbangkan semua aspek kehidupan secara holistik. Dengan demikian perdamaian dapat tercipta karena PBB dapat menjadi perangkat penyelesaian konflik yang dapat berfungsi untuk mencegah konflik.

2.4 Teori Kapabilitas. Andrew Cottey dan Anthony Foster (2004: 52 - 63) berpendapat bahwa diplomasi pertahanan mencakup pelibatan kerjasama strategis (*strategic engagement*) dengan negara yang pernah menjadi musuh atau berpotensi menjadi musuh untuk mencegah konflik dan untuk mengembangkan apa yang disebut saling percaya (*Confidence Building Measures/CBM*), mendorong kerja sama multilateral di kawasan, mempromosikan hubungan sipil-militer yang demokratis serta memperkuat kapabilitas pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping operations*). Beberapa aspek kerja sama dalam pengembangan kapabilitas dalam pemeliharaan perdamaian mencakup beberapa hal, diantaranya pengembangan konsep dan doktrin yang digunakan dalam operasional di lapangan, perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan bersama, kemampuan manajemen krisis, penyiapan perlengkapan / materiil yang dibutuhkan dalam operasi. Beberapa hal tersebut penting dalam mewujudkan standar operasi yang baku bagi seluruh *peacekeepers*, integrasi dengan pasukan dari negara lain serta stakeholders lainnya.

Menurut Hagell III dan Brown (2005), kapabilitas merupakan kemampuan untuk memobilisasi sumber daya untuk menghasilkan nilai yang melebihi biaya yang dikeluarkan. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya yang memiliki tampak fisik (*tangible resources*) dan yang memiliki sifat tidak tampak (*intangible resources*). Sumber daya yang memiliki sifat tampak yang kongkrit antara lain adalah sumber daya financial, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik lainnya. Sedangkan yang biasanya dianggap merupakan sumber daya yang tidak tampak antara lain



semangat, moril, talenta, kerja sama, potensi atau kekuatan karakter dan kompetensi yang dimilikinya serta kapabilitasnya untuk mengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan.

2.5 Teori Kampanye Militer. Teori Kampanye Militer berkembang seiring perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia. Definisi kampanye militer menurut *Princeton University* (2010) adalah “*Several related operations aimed at achieving a particular goal (usually within geographical and temporal constraints.*” Dalam konteks ilmu militer, kampanye militer diambil dari nama tempat operasi perang tahunan oleh Tentara Romawi yaitu Campania yang mengandung pengertian rencana strategi militer yang signifikan yang menggabungkan serangkaian operasi atau pertempuran militer yang saling terkait yang membentuk bagian berbeda dari konflik yang lebih besar dengan durasi panjang yang sering disebut perang. Sedangkan Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1059/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kampanye Militer, disebut kampanye militer adalah seni yang menghubungkan strategi medan pertempuran (taktik) dengan strategi operasional yang dirancang dalam rangka pencapaian baik untuk tujuan strategi militer (strategi nasional) maupun tujuan operasi militer yang dilaksanakan dalam ruang dan waktu yang telah ditentukan. Kampanye Militer diarahkan untuk menghancurkan *Center of Gravity* (COG) musuh yang mempunyai niat atau telah melakukan invasi dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kampanye militer diselenggarakan melalui upaya terpadu dengan mengerahkan seluruh kekuatan nasional yang disinkronisasikan dengan upaya-upaya diplomasi politik. Implementasinya berupa serangkaian dari beberapa Operasi Gabungan TNI yang dilaksanakan secara berurutan atau secara serentak, untuk mencapai sasaran strategis dan operasional pada suatu ruang dan waktu yang telah ditentukan dengan melibatkan Komando Permanen seperti Kogabwilhan atau Komando bentukan, dalam bentuk Komando Gabungan (Kogab) dan atau Komando Tugas Gabungan (Kogasgab). Penyelenggaraan Kampanye Militer tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik



nasional yang melibatkan strata Strategi Raya/Strategi Nasional (*Grand/National Strategy*), Strata Strategi Militer dan dilaksanakan oleh Panglima Komando Gabungan (Pangkogab) pada strata Strategi Operasional dan Panglima Komando Tugas Gabungan (Pangkogasgab) pada strata Strategi Taktis/Medan untuk tercapainya kepentingan nasional (Cita-cita dan Tujuan Nasional).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggambarkan suatu permasalahan melalui pemahaman yang mendalam dan mengembangkan pemahaman terhadap suatu fenomena (Creswell, 2012:16). Pendekatan yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah secara holistik yaitu mengetahui inti dari suatu bentuk permasalahan dan *bricolage* yaitu memahami beberapa sudut pandang ataupun perspektif yang berbeda pada suatu fenomena (Tracy, 2013:26). Peneliti pada penelitian kualitatif mengidentifikasi pemikiran dari informan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang informan terkait fenomena yang diteliti (Taylor *et. al*, 2016:8).

Karena dalam penelitian kualitatif ini tidak melakukan pengukuran, tetapi eksplorasi untuk menemukan, maka yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri selaku *human instrument*. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen penelitian kualitatif yang siap melakukan penelitian di lapangan dilakukan oleh peneliti sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori serta wawasan terhadap bidang yang diteliti. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan yang didapat selama penelitian.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada salah satu desain penelitian kualitatif yang disarankan oleh Creswell (2014:42-43), yaitu Studi Kasus. Yin (2009:3) juga menjelaskan bahwa Studi kasus merupakan salah satu cara dalam melaksanakan penelitian ilmu sosial melalui penyelidikan empiris yang



menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Metode penelitian studi kasus tersebut merupakan strategi yang tepat untuk penelitian yang menggunakan pokok pertanyaan penelitian “*how*” (bagaimana) atau *why* (mengapa), dimana peneliti memiliki sedikit waktu untuk mengontrol peristiwa yang diteliti, sehingga fokus penelitian yang dilaksanakan adalah untuk melacak fenomena kontemporer. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa kejadian (multi kasus) dalam penyelenggaraan pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian PBB periode 2018 s.d. 2020 yang dilaksanakan oleh TNI

4. Hasil dan Diskusi

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia menghadapi ancaman multidimensional pada Misi Perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo.

Penelitian kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia menghadapi ancaman multidimensional pada misi perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo dilakukan dengan melaksanakan wawancara terhadap nara sumber yang terlibat secara langsung dalam pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia pada misi perdamaian PBB, para Dansatgas yang sedang dan baru melaksanakan penugasan, observasi di PMPP TNI khususnya pada saat seleksi dan latihan Pra Tugas (*Predeployment Training/PDT*) serta penelitian dokumentasi penyelenggaraan OPPD pada kurun waktu 2018 s.d. 2020. Peneliti menggunakan wawancara semistruktur guna mendapatkan informasi secara lebih terbuka dari subyek penelitian berasal dari instansi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, PMPP TNI dan pakar yang membidangi masalah pertahanan, hubungan luar negeri dan misi perdamaian PBB.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disajikan gambaran secara lebih detail terkait dengan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia menghadapi ancaman multidimensional pada Misi Perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo, melalui tiga studi kasus yaitu keberhasilan mendamaikan dua suku yang bertikai oleh Satgas Batalyon RDB XXXIX/Monusco Kongo, insiden kebakaran generator dan meledaknya



pemadam kebakaran di camp Satgas Kizi TNI XX//Monusco Kongo, dan atensi PBB terkait kesiapan material Satgas Kizi TNI XX/Monusco Kongo.

Sesuai pada pasal 10 UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, kewenangan pengiriman Satgas TNI Konga pada misi pemeliharaan Perdamaian dunia merupakan implementasi dari kebijakan politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden, dan dengan persetujuan dari DPR. Presiden menetapkan kebijakan sebagai dasar pengalokasian sumber daya nasional, terutama kekuatan militer dan kekuatan serta kualitas diplomasi negara di kancah internasional. Dan untuk itu proses perencanaan penyiapan Pasukan perdamaian PBB dimulai dari tataran strategis sebagai keputusan politik Negara, yang diwujudkan dalam bentuk Undang-undang yang dijabarkan dalam peraturan di bawahnya, dalam bentuk Peraturan Presiden Nomer 86 tahun 2015 Pengiriman Misi Perdamaian Dunia, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia. Dalam tataran operasional, maka Perppang Nomor 60 tahun 2018 tentang penugasan Prajurit TNI pada Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia perlu dirumuskan ulang sesuai dengan perkembangan *UN Guideliness for Operational Readiness Preparation for Troop Contributing Countries in Peacekeeping Missions*.

Terkait dengan implementasi *UN Guideliness* tersebut, Joni Abdi, Kasudbit OPPD Dittrakomput Ditjen Potan Kemenhan RI, menyampaikan bahwa, “pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian PBB masih mengalami beberapa kendala yang perlu segera diselesaikan, khususnya terkait masalah regulasi.” (wawancara 13 Juli 2021). PBB sebagai organisasi internasional yang bekerja berdasarkan kontribusi dari semua anggotanya dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Secara logis, maka Dalam konteks regulasi, PBB dengan sistim UNPCRS menuntut kesiapan pasukan *standby forces*, namun belum diketahui kemana dan kapan akan ditugaskan. Kondisi belum terwadahi dalam Perpres 86 tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Perdamaian Dunia. Secara prinsip sesuai dengan Perpres 86 tahun 2015, segala pembiayaan untuk pengiriman misi pemeliharaan perdamaian dunia



dibiayai dari APBN dan anggaran reimbursement. Penganggaran tersebut diperlukan untuk penyiapan dan penguatan personel, latihan, materiil dan bekal ulang selama pelaksanaan operasi. Namun demikian, anggaran APBN tidak dapat didukung jika tidak terdapat Kepres, sedangkan Keppres akan dikeluarkan setelah ada kepastian Negara tujuan dan waktu *deployment*

Dikdik, Paban VIII/Opslugri Sops TNI, menyampaikan bahwa, Panglima TNI telah melaksanakan beberapa kebijakan dalam proses perencanaan, diantaranya, menerbitkan STR Panglima TNI Nomor STR/35/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian PBB dan Milobs/Milstaff TNI sebagai Standby Forces UNPCRS pada misi PBB. Berdasarkan STR yang dikeluarkan tersebut, Mabes TNI menerapkan kebijakan sebagai alternatif solusi atas kendala dukungan anggaran pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian PBB Baru dengan mengoptimalkan kemampuan satuan yang ditunjuk untuk melaksanakan penyiapan personel dan materiilnya. Faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah kompetensi para unsur pimpinan dan Staf pada jabatan kunci terkait OPPD, seperti Komandan PMPP TNI, Penmil RI pada PTRI, New York dan Dir KIPS, Ditjen Multilateral Kemenlu RI serta efektifitas tahapan penyiapan yang dilaksanakan. (wawancara 12 Juli 2021)

Indhan, Paban IV/Gar Srenum, menjelaskan bahwa rencana pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian, khususnya pembentukan Satgas baru didasarkan kepada hasil evaluasi dan proyeksi kebutuhan penugasan satuan dan personel yang dikeluarkan PBB setiap 2 (dua) tahun sekali untuk kebutuhan penugasan di semua misi PBB pada satu tahun ke berikutnya. Namun demikian, upaya tersebut belum dapat mengatasi kendala ketersediaan sarana dan prasarana Satgas sesuai standar PBB, sehingga sangat membatasi perencanaan yang disusun TNI. (wawancara 12 Juli 2021)

Gede Sumertha, pemerhati masalah operasi pemeliharaan perdamaian dunia, menyampaikan beberapa hal terkait ancaman multidimensional dan pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian PBB, sebagai berikut:

Ancaman multidimensional dalam misi perdamaian PBB, salah satunya dapat terlihat dari situasi penugasan di DRC yang sangat spesifik dan perlu mendapatkan



atensi bagi pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia. situasi tersebut terkait dengan implementasi dari *UN Chapter VI* atau *Chapter VII* yang menegaskan perbedaan pendekatan penggunaan kekuatan bersenjata. Hal tersebut juga terkait dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, khususnya terkait tuntutan implementasi *UN Chapter VII* yang lebih berorientasi kepada penggunaan kekuatan dalam kerangka *peace enforcement* tidak sesuai dengan perundang-undangan Indonesia. Hal ini perlu dipertegas oleh Pemerintah Indonesia, khususnya dalam forum TKMPP sehingga tidak terjadi kesalahan bertindak oleh para pasukan perdamaian Indonesia, khususnya dalam mengatasi situasi krisis. Di sisi lain, para pasukan perdamaian Indonesia perlu dibekali *Rule of Engagement* untuk memberikan keyakinan dalam mengambil tindakan penggunaan kekuatan dalam koridor hukum internasional serta prinsip-prinsip operasi pemeliharaan perdamaian dunia, khususnya prinsip ketiga, yaitu *Non-use of force except in self-defence and defence of the mandate*. Pelaksanaan rotasi material COE yang sudah memenuhi persyaratan PBB, yaitu minimal tujuh tahun di daerah operasi atau telah melewati separuh dari usia pakai serta pendisposalan materiil rusak berat di daerah operasi juga perlu dilaksanakan. (wawancara 9 Oktober 2021)

4.1.2. Strategi TNI dalam melaksanakan pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia

Menyoroti masalah strategi TNI dalam melaksanakan pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia menghadapi ancaman multidimensional, Viktor Simatupang, Komandan PMPP TNI menjelaskan bahwa secara umum pembangunan kapabilitas yang dilaksanakan PMPP TNI meliputi aspek aspek personel maupun materiil. Dari aspek kapabilitas personel, PMPP TNI melaksanakan *Train of the trainer* bagi personel Satgas inti di PMPP TNI, *mobile team training* sebagai implementasi dan lanjutan dari *Train of the trainer* di Satuan yang ditunjuk dengan supervisi dari PMPP TNI, sehingga kemampuan yang dimiliki *peacekeepers* sesuai dengan standar PBB. Indonesia juga telah berupaya menggandeng peluang kerja sama dengan PBB, melalui proposal standarisasi kepelatihan PMPP TNI dari *Integrated Training Section (ITS)*, PBB



dan kerangka *Triangular Partnership Project* (TPP). Hal ini penting dalam rangka mempromosikan PMPP TNI sebagai lembaga pelatihan berstandar internasional / PBB, sehingga mendapat pengakuan dari PBB untuk dapat menyelenggarakan pelatihan – pelatihan PBB, termasuk pelatihan bagi calon Pemimpin / pejabat strategis di daerah misi yaitu *Senior Mission Leader Courses* (SML). (wawancara tanggal 12 Juli 2021).

Selanjutnya dari aspek materiil, Viktor Simatupang menjelaskan bahwa pembangunan kapabilitas diselenggarakan dengan pengadaan materiil baru dan perbaikan materiil dengan menggunakan dana *reimbursement* serta pemanfaatan materiil Ex-Satgas lain yang sudah kembali ke tanah air dan atau kelebihan materiil Satgas yang ada di PMPP TNI. Kebijakan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyiapkan Satgas baru yang diajukan ke PBB dalam bentuk *pledge* sesuai mekanisme UNPCRS serta untuk Satgas yang telah rutin dilaksanakan. (wawancara tanggal 12 Juli 2021).

4.1.3 Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia.

Pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia dipengaruhi berbagai faktor yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan dinamika ancaman yang dihadapi maupun dalam proses pembangunan kapabilitas itu sendiri. Pertama, berbagai sengketa dan konflik yang terjadi di dunia, mendorong terbentuknya polarisasi global yang sangat nyata, dengan Amerika Serikat (AS) dan NATO di satu sisi, serta Rusia dan Tiongkok di sisi lain. Beberapa konflik yang terjadi di antaranya adalah konflik Israel dan Palestina, Konflik Armenia dan Azerbaijan, sengketa Rusia dan Ukraina, sengketa Laut Tiongkok Selatan dan lain-lain. Konflik-konflik tersebut mempengaruhi fluktuasi harga minyak dunia, memperburuk situasi keamanan di berbagai kawasan, serta meningkatkan jumlah pengungsi dan imigran. Menyikapi hal tersebut, maka penyiapan Satgas TNI yang dilibatkan dalam misi perdamaian dunia harus dilaksanakan secara selektif dan proporsional menyesuaikan situasi keamanan global dan konstelasi politik dunia akibat adanya polarisasi global tersebut.



Kedua, perkembangan TIK yang sangat pesat, ibarat dua sisi mata uang, dimana satu sisi sangat menguntungkan kehidupan manusia, namun di sisi lain mengakibatkan perkembangan spektrum ancaman yang semakin luas. Beberapa ancaman sebagai dampak negatif perkembangan TIK adalah potensi serangan siber dalam bentuk *cyber-espionage* (mata-mata) dan *cyber-sabotage* (sabotase) yang dapat menyerang infrastruktur strategis berbasis informasi, dan mengancam sistem keamanan digital global. Serangan siber dapat digunakan sebagai pendahuluan dalam melumpuhkan suatu negara pada suatu konflik, dengan cara meTerorismeas informasi penting, melumpuhkan sistem kendali elektronik Alutsista atau infrastruktur publik yang dapat berdampak terhadap keamanan dan keselamatan rakyat banyak. Motif dari serangan siber tersebut sangat beragam mencakup permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, hukum serta pertahanan dan keamanan. TIK juga digunakan pada setiap misi PBB, dan menuntut kelengkapan TIK dengan standar cukup tinggi sebagai bagian dari *Self-Sustainment* dari setiap T/PCCs. Menyikapi hal tersebut, maka penyiapan Satgas TNI yang diproyeksikan dalam misi perdamaian PBB harus berorientasi kepada kelengkapan dan kemampuan para peacekeepers dalam menerapkan TIK suai standar PBB dengan optimal.

Ketiga, aktivitas terorisme global masih terus berlangsung di berbagai belahan dunia, baik secara organisasi maupun individu (Lone wolf). Beberapa kelompok teroris yang memiliki pengaruh relatif besar antara lain Al-Qaida dan afiliasinya, Al-Shabab, Boko Haram, Daesh/IS dan afiliasinya, serta Taliban. Berbagai upaya internasional telah dilakukan untuk mempersempit ruang gerak aktivitas terorisme di antaranya mengaitkannya dengan aktivitas kejahatan internasional terorganisasi (Trans-Organized Crime –TOC) guna memotong aliran pendanaan terorisme dan mendorong upaya internasional untuk menghadapi aktivitas terorisme yang bersifat terpusat serta berpotensi atau memiliki pengaruh dan/atau dapat menginspirasi kebangkitan ideologi terorisme secara global dengan menggunakan kekuatan bersenjata, sebagaimana yang tengah berlangsung di Suriah dan Irak terhadap ISIS. Menyikapi hal tersebut, maka



penyiapan Satgas TNI yang dilibatkan dalam misi perdamaian dunia harus dilaksanakan secara selektif dan proporsional menyesuaikan kondisi anggaran PBB.

Keempat, perkembangan lingkungan strategis saat ini diwarnai dengan adanya strategic surprises setelah merebaknya Pandemi Covid-19 di hampir seluruh Negara di dunia. Selain mengakibatkan 173.698.490 kasus dengan 3.735.559 korban meninggal di 222 negara sampai dengan 6 Juni 2021, pandemi Covid-19 telah berdampak pada ketidakpastian dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat dunia. Dampak yang ditimbulkan bahkan lebih buruk dari bencana alam dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir atau korban yang jatuh pada perang dunia pada periode yang sama. Pada sektor ekonomi, hampir seluruh negara yang terdampak mengalami resesi ekonomi yang cukup parah dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa negara kontributor finansial terbesar di dunia yang mendukung operasional misi PBB, juga mengalami resesi ekonomi yang tergolong dalam 10 negara paling terdampak, seperti Amerika Serikat dengan pertumbuhan ekonomi minus 32,9%, Inggris minus 20,4% dan Jepang minus 7,8%.

4.2. Diskusi

4.2.1. Kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia menghadapi ancaman multidimensional pada Misi Perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo.

Berdasarkan 3 (tiga) studi kasus yang diteliti, dapat diketahui bahwa walaupun performa Satgas PBB dari Indonesia dinilai berhasil menjalankan tugas-tugas yang diberikan sesuai mandat, namun masih terdapat beberapa kendala dalam proses pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian. Kendala dalam pembangunan kapabilitas tersebut telah berdampak kepada kesiapan personel dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan di daerah misi, kerugian personel akibat kecelakaan maupun peringatan dari PBB yang jika tidak diperbaiki akan direpatriasi karena under performance.

Peneliti juga menemukan bahwa secara umum pengiriman pasukan perdamaian belum dapat dieksplorasi secara optimal untuk mendukung penguatan diplomasi



pertahanan. Diplomasi pertahanan yang dilaksanakan meliputi pengembangan hubungan antar anggota militer T/PCCS masih terbatas pada hubungan personel dan belum ditingkatkan secara institusi. Hal yang sama dalam penyiapan tugas-tugas latihan dan asistensi dalam reformasi sektor keamanan hanya dilakukan sebatas sebagai implementasi mandat PBB yang harus dilaksanakan semua Satgas dalam suatu misi tertentu. Sampai dengan saat ini belum ada upaya secara konkret dalam pembangunan kerja sama pertahanan dalam rangka penyediaan perlengkapan militer dan bantuan lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah misi yang ditetapkan oleh PBB.

Keberhasilan mendamaikan dua suku yang bertikai oleh Satgas Batalyon RDB XXXIX/Monusco Kongo, lebih kepada bekal kemampuan personel dalam melaksanakan fungsi Binter yang telah melekat dalam jiwa para personel yang tergabung dalam penugasan. Beberapa irisan materi Binter dan CIMIC yang telah diberikan pada proses pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia selama di PMPP melalui PDT dan di daerah misi Kongo dalam bentuk induction training telah memperkuat pemahaman para peacekeepers dalam memenangkan hati dan pikiran (to win the heart and mind) rakyat Kongo.

4.2.2 Strategi TNI dalam melaksanakan pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia

Berdasarkan beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan kepada para narasumber terkait dengan proses pembangunan kapabilitas serta *output* dan *outcome* yang dihasilkan yang digambarkan dalam 3 (tiga) studi kasus yang disajikan. Teori kapabilitas Andrew Cottey dan Anthony Foster (2004), Hagell III dan Brown (2005), serta Hasbi Mahyudin (2021), saling melengkapi dimana dari ketiga teori tersebut dapat disintesis bahwa pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian PBB guna meghadapi tantangan tugas beraspek multidimensional, memerlukan pembagunan pada aspek regulasi sebagai payung hukum dan dukungan anggaran; kualitas SDM, serta sarana dan prasarana. Dalam penyusunan strategi, perlu adanya program yang didukung dengan anggaran



berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan (Rachmat, 2014), dalam hal ini prosedur dalam sistem UNPCRS. Selanjutnya mengingat penggelaran operasi perdamaian PBB merupakan gelar kekuatan bersenjata yang sangat kompleks, dan memerlukan peran serta mulai dari tataran grand strategi sampai dengan tataran taktis, maka dapat dikatakan bahwa penggelaran operasi perdamaian PBB merupakan salah satu dari upaya kampanye militer yang dipersiapkan sebagai bagian dari Opsgabmapad dalam skala yang lebih luas, dengan sasaran sesuai mandat yang lebih kompleks dengan menggunakan sumber daya dari PBB dan negara anggota yang terlibat sebagai T/PCCs serta pada ruang serta waktu tertentu sesuai dengan analisa dan kebijakan dari Dewan Keamanan PBB.

Strategi pembangunan kemampuan pasukan perdamaian Indonesia menghadapi ancaman multidimensional dalam Misi Perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo, juga tidak terlepas dari manfaat yang ditawarkan Freed (2006, hal 20) sebagai instrumen dalam mengantisipasi perubahan lingkungan, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif dari perubahan kondisi lingkungan strategis. Untuk itu perlu perumusan kebijakan pada level *grand strategy* sebagai dasar perumusan strategi. Rumusan kebijakan tersebut perlu diarahkan dalam mengeliminir simpul permasalahan yang masih timbul dalam pembangunan kemampuan, khususnya pada periode 2018 s.d. 2020 untuk pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di Kongo, khususnya terkait dengan perlunya sinkronisasi regulasi nasional dengan kebijakan PBB, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM profesional, pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyiapan Satgas, serta pembentukan Satuan Standby Forces, yang siap di-deploy pada misi pemeliharaan perdamaian dunia sekaligus siap dikerahkan untuk mem-backup kebutuhan operasi dalam negeri maupun operasi kemanusiaan lain di kawasan regional Asia Pasifik guna meningkatkan kontribusi pasukan perdamaian PBB dalam rangka memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia.

4.3. Model pembangunan kemampuan pasukan perdamaian Indonesia menghadapi ancaman multidimensional dalam Misi Perdamaian PBB yang ditawarkan.



Pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian PBB yang diharapkan adalah mampu menghadapi semua tuntutan tugas dan dinamika perkembangan daerah operasi pada setiap misi PBB sekaligus mampu mendukung tugas Pokok TNI di dalam negeri secara optimal. Terkait tidak adanya jaminan deployment ke daerah misi PBB, maka setiap Satgas yang disiapkan sebagai Kontingen Garuda, dalam masa tunggu di tanah air harus siap digerakkan melaksanakan tugas serupa di dalam negeri. Untuk itu maka pemilihan jenis Satgas yang akan disiapkan untuk misi PBB harus selaras dengan jenis dan karakteristik Satuan yang dibutuhkan dalam penugasan operasi di dalam negeri, termasuk di dalamnya dalam menghadapi tugas-tugas pengamanan daerah rawan, bantuan kemanusiaan dan bencana alam, serta penanganan konflik sosial dan ancaman terorisme. Walaupun keikutsertaan Indonesia dalam upaya perdamaian dunia melalui pengiriman Pasukan perdamaian PBB, namun penyiapannya masih dianggap oleh sebagian komponen bangsa sebagai tugas TNI. Faktanya, benefits atas kontribusi Indonesia tersebut, berdampak strategis bagi kepentingan politik luar negeri Indonesia. Untuk itu, Negara melalui semua K/L terkait dituntut untuk mampu bersinergi dan berkolaborasi dalam menyiapkan Pasukan perdamaian PBB, secara optimal. Melalui analisis dengan menggunakan teori Hubungan Internasional, teori Polstranas, teori manajemen, teori Diplomasi Pertahanan serta teori Fishbone Ishikawa, dihadapkan pada trend dan potensi konflik pada masa depan, sudah seharusnya Indonesia menyesuaikan dengan perubahan sistim pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian PBB, UNPCRS secara responsif dan adaptif dengan tetap mempertimbangkan kepentingan operasi militer di dalam negeri melalui sinkronisasi Probangkuat TNI pada periode pembangunan saat ini juga (periode 2020 – 2024) secara bertahap, bertingkat dan berlanjut.

Adapun model pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia menghadapi ancaman multidimensional dalam Misi Perdamaian PBB yang ditawarkan dari hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut:



4.3.1 Model Strategi TNI dalam melaksanakan pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia pada unsur Ends.

Pada unsur ends, maka pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia sebenarnya sudah tercermin dalam kebijakan Pemerintah Indonesia yang dinyatakan dalam beberapa events. Komitmen tersebut juga tercermin dari diusungnya isu peacekeeping sebagai tema presidensi Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019 s.d. 2020. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia mengusung isu peacekeeping sebagai tema presidensi Indonesia pada bulan Mei 2019, sebagai bagian dari prioritas keanggotaan Indonesia memberikan kontribusi terhadap penguatan ekosistem/geopolitik perdamaian dan stabilitas global. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan dalam the Asian-African Summit 2015 bahwa, *“Indonesia as new emerging economic force, as a country with the largest moslem population on earth and as the third largest democracy, stands ready to play a global role as a positive force for peace and prosperity. Indonesia is ready to cooperate with all parties to fulfill that noble goal.”* Guna menghadapi ancaman multidimensional sebagai dampak perkembangan lingkungan strategis, maka perlu dirumuskan suatu kebijakan yang berisi rumusan untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai melalui langkah-langkah strategis dengan menggunakan kekuatan nasional yang dimiliki. Hal tersebut penting, karena sesuai dengan teori Polstranas bahwa rumusan kebijakan tersebut di atas diperlukan guna mencapai tujuan dan cita-cita nasional, khususnya terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia dengan tetap memprioritaskan kepentingan operasi di dalam negeri.

Rumusan ends sebagai kebijakan yang dapat dipertimbangkan sebagai model dalam pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia sesuai pembahasan dalam penelitian adalah: *“Terwujudnya kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia berdasarkan UNPCRS melalui sinkronisasi regulasi nasional dengan kebijakan PBB, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM profesional, pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyiapan Satgas, serta pembentukan Satuan Standby Forces, yang siap di-deploy pada misi pemeliharaan perdamaian dunia sekaligus siap*



dikerahkan untuk mem-backup kebutuhan operasi dalam negeri maupun operasi kemanusiaan lain di kawasan regional Asia Pasifik guna meningkatkan kontribusi pasukan perdamaian PBB dalam rangka memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia”.

4.3.2 Model Strategi TNI dalam melaksanakan pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia pada Aspek *Means*.

a. Aspek Regulasi. Pengiriman Satgas TNI Konga pada misi pemeliharaan Perdamaian dunia merupakan implementasi dari kebijakan politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh legislatif, yudikatif dan eksekutif dengan mengerahkan sumber daya nasional, terutama kekuatan militer dan kekuatan serta kualitas diplomasi negara di kancah internasional. Dan untuk itu proses perencanaan pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia dimulai dari tataran strategis sebagai keputusan politik Negara, yang diwujudkan dalam bentuk Undang-undang yang sesuai dengan keadaan saat ini. Terkait dengan kewenangan Presiden dalam hal pengiriman pasukan perdamaian PBB sesuai pada pasal 10 UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, maka perlu penegasan Perpres yang juga mengatur tentang kegiatan pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian PBB baru yang perlu didaftarkan sesuai kebijakan PBB, khususnya UNPCRS, sebagai dasar pengalokasian anggaran oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya dijabarkan ke dalam regulasi turunan dari Perpres tersebut, yaitu Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia. Dalam tataran operasional, maka Perpang Nomor 60 tahun 2018 tentang penugasan Prajurit TNI pada Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia, perlu dirumuskan ulang sesuai dengan perkembangan *UN Guideliness for Operational Readiness Preparation for Troop Contributng Countries in Peacekeeping Missions*.

b. Aspek Anggaran. Dukungan anggaran yang proporsional sangat diperlukan dalam pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia, khususnya untuk

penyiapan materiil ME dan SS serta kemampuan personel sesuai dengan standar PBB. Dalam rangka sustainability kemampuan personel dan materiil, maka dukungan anggaran perlu didukung baik sebelum, selama dan sesudah Satgas melaksanakan penugasan. Dukungan anggaran untuk mendukung kemampuan personel terdiri dari anggaran penyusunan piranti lunak latihan dan doktrin, penyelenggaraan rekrutmen, pelatihan, perawatan personel selama penugasan yang tidak dikaver PBB atau saat masa menunggu sebagai standby forces serta setelah purna tugas. Sedangkan anggaran untuk mendukung kemampuan materiil yang meliputi siklus pengadaan materiil dan logistik secara berkesinambungan sampai dengan proses, pemakaian, pemeliharaan disposal (*Life cycle cost*). Selain itu, berdasarkan Graham Clarck, Paul Piperias and Richard Trail, dalam bukunya *Life-Cycle Cost/Capability Analysis for Defence Systems*, perhitungan dukungan anggaran harus dapat memberikan dukungan logistik secara terintegrasi (*Integrated Logistics Support*) meliputi sepuluh elemen yang saling terkait, yaitu dukungan teknik, pemeliharaan, computer, perbekalan, data, personel, fasilitas, pelatihan, pergudangan, transportasi dan pelayanan. Dukungan anggaran tidak hanya untuk pembelian platform semata, namun sekaligus termasuk paket MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), dalam jangka waktu minimal 7 (tujuh) tahun, sehingga setelahnya dapat diajukan rotasi dengan menggunakan fasilitas PBB sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Satgas tidak terlalu terbebani dengan kegiatan MRO.

c. Aspek Organisasi. Pada tataran strategis, organisasi TKMPP diharapkan menjadi wahana koordinasi dan penyelesaian semua persoalan terkait penyelenggaraan OPPD secara efektif. Proses penyelesaian diselenggarakan sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan yang tepat, cepat, sinergis dan menyeluruh sesuai dengan Tupoksi tiap K/L. PMPP TNI selaku badan pelaksana pada tataran operasional dan taktis tidak dibebani dengan persoalan ranah strategis, khususnya masalah regulasi dan dukungan anggaran.



Tuntutan pemenuhan target rasio *women peacekeepers* Indonesia sesuai target PBB dalam *Uniformed Gender Paity Strategy 2018-2028*, jika dihadapkan dengan kultur Wanita TNI cukup berat. Untuk itu perlu ada jabatan khusus di PMPP TNI, yakni *Gender Adviser* (Penasehat Gender) yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan sosialisasi, memberikan rekomendasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi dan hal lain terkait upaya pencapaian target tersebut. Pejabat tersebut juga bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi dan kegiatan lain dengan staf UN HQ, di bagian *Gender Unit*, diantaranya pelaksanaan pelatihan, seminar dan konferensi terkait *women peacekeepers*. Mengingat beban tugas tersebut, maka Pejabat *Gender Adviser* adalah Pamen Wan TNI berpangkat Kolonel Promosi di bawah Kapokli PMPP TNI sebagai bagian dari jabatan fungsional yang membantu tugas-tugas khusus Komandan PMPP TNI.

Perkembangan daerah misi PBB yang sangat dinamis, serta potensi ancaman yang semakin kompleks, bersifat multidimensional dan tidak menentu juga menuntut adanya jabatan sebagai bagian dari jabatan fungsional yang membantu tugas-tugas khusus Komandan PMPP TNI dalam melaksanakan analisa misi yaitu *Mission Analyst*. Jabatan tersebut sangat penting guna memberikan saran dan masukan kepada Komandan PMPP TNI dalam hal perkembangan lingkungan global, regional dan nasional negara tuan rumah sebagai daerah misi PBB yang akan berimplikasi terhadap penugasan pasukan PBB, khususnya Pasukan perdamaian PBB. Hasil analisa juga dapat dijadikan pertimbangan penentuan daerah misi yang diproyeksikan bagi penugasan Pasukan perdamaian PBB yang disiapkan. Selain itu pejabat *Mission Analyst* dapat melaksanakan analisa terhadap doktrin, tugas-tugas yang akan dilaksanakan atau sedang dilaksanakan serta kesesuaiannya dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, serta hal-hal lain yang bersifat strategis dan operasional.

Selanjutnya guna mengatasi gap yang ada, khususnya terkait dukungan operasi yang masih sering menjadi kendala dalam operasional Satgas di daerah misi, perlu ada pejabat fungsional yang membuat analisa sumber daya yang dibutuhkan



dihadapkan dengan sumber daya yang dimiliki, yaitu Dukungan Operasional (Operational Support). Pejabat tersebut membantu Komandan PMPP TNI dalam membuat keputusan dengan memberikan masukan dan saran tindakan terkait semua persoalan yang timbul dalam mekanisme dukungan operasi bagi Pasukan perdamaian PBB. Salah satu hal menonjol terkait masalah dukungan operasional dan masih belum terselesaikan dalam dua dekade terakhir adalah dukungan sparepart dan bekal yang sangat terkait dengan kebijakan PBB dalam penerapan sistem dry lease dan wet lease, serta hubungannya dengan masalah kepabean di beberapa negara yang dilalui serta negara tuan rumah. Terkait kompleksnya ketiga permasalahan di atas serta kebutuhan akan jalur koordinasi dengan beberapa instansi strategis, maka ketiga usulan pejabat baru tersebut perlu dikordinir oleh seorang Pati bintang satu untuk menjabat sebagai Kapokli PMPP TNI.

Dalam konteks teknis, dalam rangka mengatasi persoalan dukungan sparepart dan bekal ulang Satgas yang masih terus terjadi, perlu pemberdayaan Pejabat pengadaan Dalam dan Luar Negeri, yaitu Kabag Ada D/LN Binlog. Pemberdayaan dimaksud meliputi kegiatan pengadaan yang dilaksanakan di luar negeri melalui koordinasi dan kerja sama dengan Kedubes RI, terdekat. Untuk mengatasi persoalan pemeliharaan Satgas di Demokratik Republik Kongo, dapat diselenggarakan disekitar daerah misi, yaitu Uganda dengan melibatkan Konsulat Kehormatan RI di Kampala, atau dengan membuka gudang dan kantor perwakilan yang bersifat adhoc di Daressalam, Tanzania dengan memanfaatkan lahan milik Kedubes RI. Dengan demikian maka, dukungan spareparts dapat diselenggarakan relatif lebih efisien, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna.

d. Aspek SDM. Dihadapkan dengan kompleksnya tuntutan tugas di daerah misi, maka penyelenggaraan pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia diharapkan dapat didukung oleh adanya SDM yang professional, baik calon anggota Satgas maupun personel yang terlibat dalam penyiapan Satgas. Calon anggota Satgas minimal memiliki kemampuan yang tertera dalam *UN Guideliness for*



Operational Readiness Preparation for Troop Contributing Countries in Peacekeeping Missions. Guna mencapai standar tersebut, maka akan lebih efektif dengan adanya sinkronisasi Sisbinlat TNI dengan Sisbinlat PBB. Sistem rekrutmen personel juga mengacu tuntutan tugas, sehingga selama penyiapan hanya bersifat memelihara atau meningkatkan kemampuan yang dimiliki sebelumnya. Lembaga dan personel yang terlibat dalam penyiapan telah berstandar internasional, khususnya dari Integrated Training Section (ITS), PBB. Para pelatih di PMPP TNI dalam menyelenggarakan latihan dan pelatihan mampu memanfaatkan teknologi berbasis TI, seperti e-learning untuk materi teori dan penggunaan Battle Management System (BMS) serta simulator untuk materi prkatek. Sebagai Peacekeeping Centre of Excellence, PMPP memiliki lembaga pendidikan dan latihan, kerja sama internasional serta penelitian dan pengembangan yang berskala internasional, termasuk didalamnya tentang pengembangan peran women peacekeepers bagi Negara-negara Timur.

e. Aspek Sarana dan Prasarana. Berdasarkan UNPCRS, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Satgas sesuai dengan SUR dan COE Manual merupakan prasyarat agar *pledge* yang dikirimkan diterima dan dapat naik ke level berikutnya, secara bertahap. Ketersediaan sarana dan prasarana latihan disesuaikan dengan daerah misi yang dipilih, baik berupa alat peraga Alins/Alongins, materi yang mudah diakses secara online serta ketersediaan medan latihan yang mendekati daerah misi sebenarnya atau yang disimulasikan. Materi-materi teori yang diajarkan harus selalu di-*update* dengan situasi daerah misi. Perubahan doktrin dan kebijakan lain dari PBB, seperti pemberlakuan kegiatan intelijen peacekeeping yang dulu tidak ada serta implementasi tugas dan pengadaan materiil yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, juga harus selalu diperbaharui. Guna kemudahan semua calon peacekeepers mendapatkan informasi secara dini, maka semua materi pelatihan dibuat dalam knowledge management system dan dikemas dalam e-learning, sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Materi tersebut



meliputi modul pelatihan the *Core Pre-deployment Training Materials (CPTM)*, *UN Specialized Training Materials*, *UN Manuals* serta materi pelatihan dasar bagi Peacekeepers lain yang disediakan PBB. Bentuk materi tersebut disediakan dalam bentuk buku, powerpoints, video-video ceramah para pemberi materi, pejabat PBB maupun gambaran situasi di daerah misi. Materi yang bersifat sensitif diberlakukan protokol keamanan sesuai dengan klasifikasinya, diantaranya pemberian *password*.

Dalam pelaksanaan pelajaran praktek, harus disediakan Alut/Alutsista serta perlengkapan spesifik lain yang digunakan di daerah operasi, sehingga semua peserta latihan/operator betul-betul mahir mengoperasikan dengan aman. Selain itu, guna efektifitas dan efisiensi latihan praktek bagi seluruh peserta dapat menggunakan simulator sesuai dengan Alut/Alutsista yang digunakan tersebut. Untuk melatih kemampuan penerapan prosedur taktik dan proses pembuatan keputusan, baik unsur pimpinan maupun prajurit di lapangan dapat menggunakan *Battle Management System (BMS)* dan Simulator. BMS berisi aplikasi *digital map* dan konten analisis yang dikemas dalam bentuk *online warfare games* dengan menggunakan LAN (*Local Area Network*). Pelaksanaan pelajaran praktek menggunakan simulator dapat berupa *fixed simulator* dan *augmented reality simulator*, sehingga dapat menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, realitas ditambah sekedar menambahkan atau melengkapi kenyataan. *Fixed simulator* berupa ruangan yang berisi perangkat TI yang menggambarkan situasi di medan operasi yang sedang atau diproyeksikan dilaksanakan oleh TNI ke depan. Sedangkan *augmented reality simulator* berupa perangkat kaca mata berkamera atau komputer tablet berkamera yang bisa menganalisis dan melihat keadaan sebenarnya. Penggunaan simulator tersebut memungkinkan pelaksanaan latihan dapat dilaksanakan secara virtual pada medan dan kondisi sosial masyarakat yang disimulasikan sesuai dengan beberapa jenis skenario latihan dapat diinjeksikan serta diperankan oleh pengendali. Pemeranan



pengedali tersebut dapat divisualisasikan sehingga para peserta pelatihan dapat berinteraksi secara langsung, contohnya jika perlu bernegosiasi dengan milisi atau menghadapi komplain dari masyarakat umum. Dengan demikian, maka para peserta latihan mendapatkan realisme latihan dan pemahaman terhadap tugas dengan lebih baik. Selain, itu melalui simulator tersebut dapat diketahui indikator keberhasilan para peserta menghadapi berbagai skenario yang dimainkan dan selanjutnya menentukan lulus atau tidaknya dalam pelatihan yang disimulasikan.

Materiil yang diperlukan sesuai *Statement of Unit Requirements (SUR)*, yang terdiri dari *major equipments (ME)* dan *self-sustainment (SS)* merupakan kunci keberhasilan dalam tahapan pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian PBBserta dalam pelaksanaan penugasan Satgas di daerah misi. Namun demikian, dengan banyaknya kebutuhan materiil, baik secara kuantitas maupun kualitas dhi. spesifikasi teknis tertentu yang telah ditentukan PBB dalam COE Manual, maka perlu dialokasikan dalam Renstra pengadaan Alut/Alutsista dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Guna menjamin keberlangsungan dukungan materiil Satgas, maka ditempuh dengan pemberdayaan Industri strategis dalam negeri secara optimal. Salah satu langkah urgent untuk mewujudkan tersebut adalah melalui pemberian *Letter of Intent* pengadaan materiil Satgas sesuai ketentuan PBB dalam COE Manual. Rencana pembentukan Satgas baru seoptimal mungkin selaras dengan proyeksi kebutuhan penugasan satuan dan personel di dalam negeri, sehingga lebih optimal, efektif dan efisien. Guna mengurangi beban tugas kegiatan pemeliharaan Satgas di daerah operasi serta besaran anggaran yang diperlukan, maka materiil yang dikirimkan ke daerah misi adalah materiil baru, dimana dalam proses pengadaan sudah *include* pemeliharaan selama 7 (tujuh) tahun. Dan sesuai prosedur dari PBB, maka material yang telah berusia 6 (lima) atau 6 (enam) tahun diajukan untuk dirotasi dengan materiil yang baru. Dukungan spareparts atau materiil lain yang dapat dibeli di sekitar daerah misi, dilaksanakan oleh Satgas atau pejabat pengadaan luar negeri sesuai pertimbangan beban tugas yang ada. Dengan demikian, maka



tidak ada tambahan anggaran yang diperlukan untuk pengiriman Alut/Alutsista maupun sparepart dari Indonesia.

4.3.3 Model Strategi TNI dalam melaksanakan pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia pada unsur *Ways*.

a. Aspek Koordinasi. Efektifitas koordinasi antar K/L dalam forum TKMPP sangat mempengaruhi kualitas pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian PBB yang diperoyeksikan sebagai *peacekeepers*. Kehadiran dan ketanggapsegeraan dari setiap K/L dalam memberikan solusi atas permasalahan sesuai Tupoksi merupakan salah satu kunci. Termasuk di dalamnya masalah regulasi dan sinkronisasi penyusunan program-program yang *feasible* dan bernilai strategis terkait OPPD, pada level strategis dan dijabarkan secara efektif pada level operasional didukung oleh K/L terkait, khususnya dalam penyiapan anggaran dan kemampuan sebagai duta diplomasi pertahanan, budaya dan ekonomi di daerah misi. Terkait potensi misi perdamaian (*peace*) dalam konteks lebih luas, maka perlu adanya grand design yang dijabarkan dalam bentuk road map pelibatan TNI dalam misi perdamaian baik di regional Asia Pasifik, maupun dunia. *Grand design* dan *Road map* yang disusun perlu dirumuskan secara valid, akurat, akuntabel dan *feasible* dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan operasi di dalam negeri.

b. Aspek Implementasi UNPCRS. Sesuai dengan tujuan dan prinsip ditetapkannya UNPCRS oleh PBB, yang salah satunya adalah pendekatan kolaboratif dan transparan (*collaborative and transparent approach*), maka Indonesia perlu membangun kolaborasi dengan Negara mitra yang satu visi dengan Indonesia dalam memberikan kontribusi untuk perdamaian dunia secara transparan. Selain itu sebagai implementasi dari teori hubungan Internasional (M Prakoso Aji dan Jerry Indrawan, 2010, hal 6), maka pembangunan kolaborasi tersebut harus dapat mengakomodir kepentingan nasional (*national interest*). Pemberdayaan industri strategis nasional harus dilaksanakan seiring dengan pembangunan *networking* dan



kerja sama dengan T/PCC lain, termasuk potensi kerja sama pengembangan industri strategis antar kedua Negara. Sehingga secara prinsip harus ada *take and give* dalam pembangunan kolaborasi tersebut guna mendukung kolaborasi tersebut, maka pemberdayaan industri nasional Penyelenggaraan kontribusi Indonesia secara genuine juga dapat dikedepankan guna mencari patner kerja sama dalam kerangka *light coordination mechanism*, dalam bentuk TPP atau *operational partnership*. Melalui kegiatan TPP yang melibatkan tiga pihak, yaitu PBB sebagai fasilitator, negara donor yang menyiapkan kebutuhan anggaran pelatihan serta negara penyelenggara (*host nation*), diharapkan lebih banyak personel TNI, Polri dan Sipil yang dapat mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan, *networking* dan kaderisasi calon *peacekeepers* yang siap diberangkatkan ke daerah misi, khususnya pada jabatan staf, pejabat strategis maupun jabatan yang memerlukan spesialisasi tertentu. TPP dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh PMPP TNI sekaligus sebagai wahana promosi untuk menjadikan PMPP TNI sebagai *center of excellence in peacekeeping* di kawasan Asia Pasifik. Implementasi dari kegiatan TPP yang perlu melibatkan PBB dan negara donor sebagai *co-host* akan memberikan dampak positif terhadap proses promosi tersebut. Kehadiran tim ahli, khususnya dari *Integrated Training Service (ITS)* dari PBB akan dapat memberikan keyakinan terhadap kualitas SDM dan sarana prasarana yang dimiliki PMPP TNI, untuk mendapatkan pengakuan dari PBB. Terkait kekurangan guna mendapatkan pengakuan dan standarisasi tersebut, maka PMPP TNI bisa mendapatkan masukan dan saran dari pihak yang paling tepat, yaitu dari Tim ITS, sehingga perbaikan yang dilaksanakan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif dan efisien. Hal ini penting dalam rangka mempromosikan PMPP TNI sebagai lembaga pelatihan berstandar internasional / PBB, sehingga mendapat pengakuan dari PBB untuk dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan PBB, termasuk pelatihan bagi calon Pemimpin / pejabat strategis di daerah misi yaitu *Senior Mission Leader Courses (SML)*. Pelibatan negara donor, selain menambah kedekatan dan kualitas kerja sama bilateral juga dapat mengurangi beban anggaran Indonesia sebagai *Host Nation*,



sehingga Indonesia dapat mengalokasikan untuk kebutuhan yang lain dan tidak terlalu membebani anggaran negara.

Sedangkan implementasi operational partnership tidak hanya dibatasi pada kerangka *co-deployment* yang pernah digagas dengan negara Australia dan Ethiopia. Guna memperluas Network sekaligus memperbesar peluang peningkatan kontribusi *peacekeepers* Indonesia, sesuai dengan tujuan diberlakukan UNPCRS maka perlu peninjauan bentuk kerja sama penugasan (operational partnership) yang lain dengan negara sahabat. Donald C.F. Daniel, Paul D. Williams dan Adam C. Smith berpendapat bahwa dalam praktek *operational partnership* selama ini, secara umum terdapat 4 (empat) model yang dapat diujicobakan Pemerintah Indonesia dengan negara sahabat berdasarkan struktur komando dalam organisasi kerja sama tersebut. Pertama adalah *attached* yaitu kerjasama penugasan dengan negara lain, dimana terdapat satuan berdiri sendiri yang lebih kecil dari suatu negara (A) berada dibawah struktur komando dari satuan yang lebih besar dari negara lain (B). Contoh dari kerja sama penugasan tersebut adalah antara Pasukan Italia dan Pasukan Slovenia yang bertugas di UNIFIL, Lebanon. Kedua, adalah *Embedded* yaitu kerjasama penugasan dengan negara lain, dimana satuan dari suatu negara (A) terintegrasi dengan satuan operasi dari negara lain (B) dengan membentuk satuan campuran, dibawah struktur Komando negara (B). Contoh dari kerja sama penugasan tersebut adalah antara Pasukan Argentina dan Pasukan Paraguay yang bertugas di UNFICYP, Cyprus. Ketiga, adalah *Co-deployed* yaitu kerjasama penugasan dengan negara lain dimana satuan operasional dari negara yang berbeda sebagai bagian dari struktur komando pasukan multinasional yang melibatkan Perwira dari kedua negara tersebut. Contoh dari kerja sama penugasan tersebut adalah antara Pasukan Finlandia dan Pasukan Irlandia yang bertugas di UNIFIL, Lebanon. Contoh dari kerja sama penugasan tersebut adalah antara Pasukan Slovakia dan Pasukan Hungaria yang bertugas di UNFICYP, Cyprus. Keempat, adalah *Composite* yaitu kerjasama penugasan dengan negara lain dimana pasukan dari dua negara atau lebih membentuk satuan



campuran dua negara atau multinasional yang bertugas di bawah struktur komando Multinasional yang melibatkan dari dua atau lebih negara.

c. Aspek Latihan. Dengan sangat dinamisnya kebutuhan operasional di daerah misi dan dihadapkan dengan besarnya kebutuhan anggaran dalam penyiapan sebuah Satgas maka TNI perlu mengambil langkah antisipatif. Penyelenggaraan ToT perlu dilanjutkan bagi personel Satgas inti yang dipersiapkan sebagai Satgas yang akan didaftarkan dalam UNPCRS di PMPP TNI. Setelah selesai mengikuti ToT tersebut, maka personel inti akan bertugas melatih anggota di satuannya agar memperoleh seluruh persyaratan administrasi serta kemampuan militer dasar dan kemampuan spesialisasi yang dipersyaratkan oleh PBB. Guna menjamin pelaksanaan latihan di satuan berjalan sesuai dengan standar PBB serta memberikan asistensi yang diperlukan selama latihan, maka PMPP TNI perlu mengirimkan mobile training team. Melalui kegiatan tersebut, maka pembengkakan anggaran akibat ketidakpastian deployment seperti dalam pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian PBB Batalyon Komposit yang disiapkan untuk misi MINUSCA, di Republik Afrika Tengah dapat dihindari.

PBB juga memberikan rekomendasi kemungkinan kerja sama antar T/PCCS, jika terlihat terdapat *gap* kemampuan yang dibutuhkan dan ketersediaan Satgas melalui light coordination mechanism, seperti *atau operational partnership*. Melalui beberapa opsi dan terdapat interaksi langkah antisipasi adanya *gap* tersebut, maka yang dinamis antara Markas Besar PBB dan T/PCC serta antara T/PCC untuk memperkuat kesiapan dan pengerahan tepat waktu dengan kualitas yang tepat. Kolaborasi antara PBB dengan T/PCCS dan T/PCCS dengan T/PCCS lain tersebut dapat ditingkatkan sejak tahap perencanaan dan persiapan melalui perwakilan tiap negara atau Penasehat Militer (*Military Advisor*) di Markas Besar PBB. Implementasi semua aspek dalam unsur *ways* pada strategi tersebut adalah terselenggaranya Manajemen George Terry (2014) melalui tindakan perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*) dan pengawasan/ pengendalian (*Controlling*)



yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain nya serta menentukan indikator keberhasilan secara terukur.

Tabel 4.3
Matriks Pembahasan Hasil Penelitian dan Model Strategi Pembangunan Kapabilitas

	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	MODEL STRATEGI PEMBANGUNAN KAPABILITAS
ENDS	Visi 4000 peacekeepers tidak tercapai, <i>Genuine?</i>	Kebijakan yang sinkron dengan UNPCRS & selaras dengan Opsdagri
MEANS		
- Regulasi	UNPCRS belum terwadahi dlm Perpres 86	Perpres & turunannya sinkron dengan UN <i>Guidelines</i>
- Anggaran	Tidak dapat dikeluarkan tanpa Perpres	Proporsional, Materiil berbasis LCC & ILS
- Organisasi	Belum optimal dihadapkan Bangsit & tuntutan tugas	Semua tugas tercakup dlm Organisasi di semua level
- SDM	Kerugian Pers Satgas, Pelatihan , Kekuatan Lobi	SDM Profesional
- Sarpras	Sarpraslat & COE sesuai SUR Terbatas, rotasi COE belum terlaksana	Terpenuhi sesuai SUR & COE <i>Manual</i> , Latihan berbasis TI (KMS & BMS)
WAYS		
- Koordinasi	Belum sinkron TKMPP-Jakum Hanneg-Renstra	<i>Grand design & road map yg feasible</i>
- Implementasi UNPCRS	<i>Pledging</i> terhambat, <i>Operational Partnership</i> terbatas, <i>Standby forces</i> belum sesuai UNPCRS	<i>Collaborative & transparent approach, light coordination mechanism, Operational Partnership, Standby forces</i>
- Latihan	Standarisasi ITS, TPP, <i>Capacity Building Programs</i>	Peningkatan & realisasi Standarisasi, TPP, CBP+ToT



5. **Kesimpulan.** Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terhadap “Strategi TNI dalam Membangun Kapabilitas Pasukan Perdamaian Indonesia Menghadapi Ancaman Multidimensional: Studi Kasus Misi PBB di Kongo” ini, dapat disimpulkan, sebagai berikut:

Pertama, Kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia dalam menghadapi ancaman multidimensional dari aspek personel, sudah menunjukkan kualitas yang membanggakan, namun masih perlu peningkatan dalam hal teknis sesuai standar PBB dalam UN Guideliness for Operational Readiness Preparation for Troop Contributng Countries in Peacekeeping Missions. Selain itu dalam pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia juga perlu mempertimbangkan semua tuntutan tugas dan dinamika perkembangan daerah operasi pada setiap misi PBB, seperti penanganan konflik sosial, penggunaan IT khususnya sosial media dan dampak yang ditimbulkan, berbagai jenis dan besaran bencana alam, terorisme dan lain-lain. Guna efektifitas pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia, maka selain berpedoman kepada tuntutan tugas di daerah misi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan operasi di dalam negeri. Selain itu juga diarahkan dalam berbagai potensi penugasan bantuan kemanusiaan dan misi perdamaian di kawasan Asia Pasifik.

Kedua, Strategi TNI dalam melaksanakan pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia menghadapi ancaman multidimensional dalam Misi Perdamaian PBB, khususnya di Kongo masih mengalami kendala signifikan dalam aspek regulasi dan dukungan anggaran yang berdampak kepada penetapan dan pemberdayaan unsur-unsur dalam strategi, yaitu ends, ways dan means. Aspek regulasi dan anggaran merupakan starting point sekaligus katalisator dalam pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia yang dilaksanakan oleh TNI dhi. PMPP TNI, sehingga jika tidak dapat diselesaikan akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia. Secara prinsip, kendala dari aspek regulasi dan anggaran mengakibatkan Indonesia tidak dapat mengimplementasikan sistim



pembangunan kapabilitas satuan tugas PBB yang telah ditetapkan sejak Juli 2015, yaitu UNPCRS. Guna mengatasi hal tersebut direkomendasikan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Unsur *ends*. TKMPP merumuskan kebijakan sebagai *ends* dalam strategi pembangunan kemampuan pasukan perdamaian Indonesia yang mengarah kepada terwujudnya kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia berdasarkan UNPCRS melalui sinkronisasi regulasi nasional dengan kebijakan PBB, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM profesional, pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyiapan Satgas, serta pembentukan Satuan *Standby Forces*, yang siap di-*deploy* pada misi pemeliharaan perdamaian dunia sekaligus siap dikerahkan untuk mem-backup kebutuhan operasi dalam negeri maupun operasi kemanusiaan lain di kawasan regional Asia Pasifik guna meningkatkan kontribusi pasukan perdamaian PBB dalam rangka memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia.
- b. Unsur *means*. Pertama, Kemenhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan melaksanakan peyusunan skala prioritas dalam pemenuhan sarana dan prasarana, termasuk Alut/Alutsista yang dibutuhkan oleh Satgas TNI Kontingen Garuda sesuai dengan SUR dan COE Manual, yang disinkronkan dengan Probangkuat pemenuhan Alut/Alutsista TNI, sehingga selain dalam rangka pemenuhan kebutuhan Satgas TNI Kontingen Garuda, juga dapat melaksanakan pemenuhan kebutuhan operasi dalam negeri dengan dukungan sarana dan prasarana berstandar Internasional guna mendukung efektifitas operasi dengan tetap mengutamakan keselamatan prajurit yang bertugas di daerah operasi di dalam negeri. Kedua, Kemenhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan bersama-sama mendorong upaya pemberdayaan dan kemandirian industri strategis nasional sebagai produsen sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia, sesuai standar PBB yang tertuang dalam COE Manual, secara bertahap dan berlanjut, melalui pengembangan produk yang telah ada atau melalui program kerja sama dengan Negara lain



dalam kerangka pengadaan langsung dengan *transfer of technology*, *joint venture* atau pendirian industri di Indonesia.

c. Unsur ways. Pertama, TKMPP melalui mekanisme yang ada mengusulkan revisi atas Perpres Nomor 86 tahun 2016 tentang pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian melalui mekanisme yang berlaku, sehingga dapat memungkinkan penyelenggaraan pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia baru dengan menyesuaikan sistem dan kebijakan lain yang ditentukan PBB, dengan tetap berorientasi kepada kebutuhan operasi di dalam negeri dalam bentuk *standby forces* serta penyelenggaraan kerja sama dengan T/PCC lain dalam bentuk *operational partnership* dan TPP guna mencapai kepentingan nasional dalam forum internasional. Kedua, Kemenhan dan Mabes TNI berdasarkan peluang dan tantangan yang ada melaksanakan pembuatan *grand design* yang dijabarkan dalam bentuk *road map* pelibatan TNI dalam misi perdamaian baik di regional Asia Pasifik, maupun dunia. *Grand design* dan *Road map* yang disusun perlu dirumuskan secara valid, akurat, akuntabel dan *feasible* dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan operasi di dalam negeri. Ketiga, Mabes TNI melaksanakan validasi organisasi PMPP TNI untuk mewadahi jabatan *Gender Adviser* serta pembentukan *standby forces*, yang disiapkan untuk proyeksi penugasan OPPD, sekaligus siap digerakkan dalam mendukung kebutuhan operasi di dalam negeri dalam masa tunggu keputusan deployment ke daerah misi oleh PBB. *Standby forces* tersebut disusun secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki TNI, dengan prioritas proyeksi penugasan daerah misi PBB yang memiliki tipologi geografis dan potensi konflik seperti di Indonesia maupun misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan lain di regional Asia Pasifik. Prioritas pembentukan adalah satuan jenis *Rapidly Deployable Battalion* (RDB) atau Batalyon Gerak Cepat (BGC) dengan proyeksi Opsdagri untuk penanganan konflik sosial, Pamrahwan) Satuan Kompi Zeni (Proyeksi Opsdagri untuk Penanggulangan Bencana Alam) di bawah Komandan PMPP TNI. Keempat, Mabes TNI dan PMPP TNI melaksanakan pengembangan



dan penerapan TI untuk mendukung pembangunan SDM professional melalui latihan dan pelatihan, dalam bentuk *Knowledge Management System* yang dapat diakses melalui *e-learning* untuk materi teori serta *Battle Management System* (BMS) dan Simulator, baik *fixed simulator* dan *augmented reality simulator* untuk memvisualisasikan situasi di daerah misi pada kegiatan praktek.

Ucapan Terimakasih. Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada: Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI Prof. Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., DESD., Dekan FSP Mayor Jenderal TNI Dr. Priyanto, S.IP., M.Si (Han) , Sesprodi SKM Kolonel Lek Haposan Simatupang, Pembimbing Tesis M.Si (Han) Kolonel Caj (Purn) Dr. Drs. Surryanto Djoko Waluyo, M.H., M.M., CIQaR dan Kolonel Inf Agus Mansyah, M.Han , para Dosen, Staf, Para Narasumber dan Rekan-rekan Program Studi Strategi dan Kampanye Militer, dan rekan mahasiswa/i Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Daftar Pustaka

- Alamsyah, Kamal. (2016). Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Cottey, Andrew dan Anthony Foster. (2004). Reshaping Defence Diplomacy: New Role for Military Cooperation and Assistance. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, John W.. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Washington DC:SAGE.
- Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata. (2020). Indonesia dan Rekam Jejak di Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Ditjenkerma Multilateral Kemenlu RI: Jakarta Pusat.
- Findlay, Trevor. (2020). Challenges for the New Peacekeepers. SIPRI Research Report No 12. Solna: SIPRI.
- Kemhan RI. (2016). Buku Putih Pertahanan RI. Jakarta: Dirjen Strahan.



- Hutabarat, Leonard F. (2017). Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia. Bandung: Parahyangan Center for International Studies.
- Octavian, Amarulla. (2012). *Militer dan Globalisasi*. Jakarta: UI Press.
- PMPP TNI. (2011). *TNI dan Misi Pemeliharaan Perdamaian; Peran PMPP TNI dalam Menyiapkan Kontingen Garuda*. Jakarta: Percetakan Abadi.
- United Nations. (2020). *Reinforcement Training Package for United Nations Military Intelligence Officers For United Nations Peace Operations*. New York: United Nations.
- Aji, M Prakoso Aji & dan Jerry Indrawan,. (2019),. "Memahami Studi Perdamaian sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional". *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol 9, No 3.
- Donald C.F. Daniel, Paul D. Williams dan Adam C. Smith., (2016). "Deploying Combined Teams : Lessons Learned from Operational Partnerships in UN Peacekeeping",. *Providing for Peacekeeping*, No.2, Agustus 2016.
- Gumilar, Nugraha. Gumilar, Tri Legionosuko, & Bintang Widagdo., (2017),. "Pengiriman Pasukan Garuda Sebagai Diploması Pertahanan Indonesia Dalam Rangka Peningkatan Alutsista Tentara Nasional Indonesia,"*Jurnal Prodi Diploması Pertahanan*, Vol 3, No.3.
- Haass, Felix dan Nadine Ansorg. (2018). "Better peacekeepers, better protection? Troop quality of United Nations peace operations and violence against civilians". *Journal of Peace Research*, Vol. 66(6).
- M Prakoso Aji & Jerry Indrawan., (2019),. "Memahami Studi Perdamaian sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional". *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol 9, No 3.
- Setyawan, Risa Wahyu Pudji Setyawan,. (2017,). "Pemberdayaan Operasi Pemeliharaan Perdamaian untuk Mempromosikan Produksi Dalam Negeri (Suatu Studi di Lebanon dan Kongo)". *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*, Vol 3, No 3.



- UN DFS. (2018)., “Operational Readiness Preparation for Troop Contributing Countries in Peacekeeping Missions”,. Guidelines., Desember 2018,Retrieved form https://peacekeeping.un.org.files%2F3._military_-_4_guidelines_on_opr.pdf, diakses pada 26 Juni 2021.
- UNGA,. (2020). “Manual on Policies and Procedures concerning the Reimbursement and Control of Contingent-Owned Equipment of Troop/Police Contributors Participating in Peacekeeping Missions” Manuals. Retrieved form, 31 Agustus 2020, <https://undocs.org/en/A/76/121>, diakses pada 20 Juni 2021.
- Department of Operational Support. (2020). “UNCOE Manual 2020”. UN Manuals. Retrieved from <https://undocs.org/en/A/76/121>, diakses pada 2 Mei 2021.
- Mahyudin Hasbi, (2016). “Kapabilitas Organisasi Publik”,. Stienobel. Retrieved form , <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/download/266/271>, diakses pada 11 Mei 2021.
- Maiese, Michelle. (Maiese, 2003),“Levels of Action (Lederach’s Pyramid),”Beyond Intractability, Retrieved from http://beyondintractability.org/essay/hierarchical_intervention_levels, diakses pada 24 April 2021.